



## DAFTAR PUSTAKA

- Adikresna, P. R., & Budisusanto, Y. (2014). Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *Geoid*, 9(2), 195-200.
- Arifin, S. (2009). Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Hukum*, 16(2), 183–204.
- Asadi, A. (2016). Penataan Batas Wilayah Administrasi Desa, Hambatan Dan Alternatif Solusi Dengan Pendekatan Geospasial. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(2), 131–147.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2021). *Katalog : Kabupaten Melawi Dalam Angka*. BPS. Kabupaten Melawi.
- Basuki, S. (2006). *Ukur Tanah*. Gama Press. Yogyakarta.
- Defwaldi. (2018). Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa dan Desa Adat Secara Partisipatif. *Tesis*. Program Pascasarjana Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ermawanto. (2019). Pemetaan Partisipatif Untuk Pembuatan Peta Batas Rt, Dusun Dan Desa Di Desa Tersidi Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. *Skripsi*. Program Sarjana Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Guo, Rongxing. (1996). *Border-Regional Economics*. Physicaverl Heidelberg. Germany.
- Hadiwijoyo, S.S. (2009). *Batas wilayah negara Indonesia : "dimensi, permasalahan, dan strategi penanganan" (sebuah tinjauan empiris dan yuridis)*. Gava Media. Jakarta.
- Hasanah, F. T. (2020). Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Indonesia. *Jurnal Geografi*, 20(13), 1–6.
- Jones, S. B. (1945). *Boundary Making, A Handbooks For Statesmen, Treaty Editors And Boundary Commissioners*. William S. Hein & Co.Inc. Buffalo. New York.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kementerian Keuangan. (2019). Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/Mk.07/2019 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
- Niendyawati, & Hidayatno, L. (2015). Aplikasi Data Inderaja dan SIG untuk Percepatan Penetapan Batas Administrasi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. *Majalah Ilmiah Globe*, 17(1), 89–95.



- Pati, dkk. (2019). *Polda Sultra Temukan 2 Desa Fiktif di Konawe*.  
<https://regional.kompas.com/read/2019/11/07/09055271/polda-sultra-temukan-2-des-a-fiktif-di-konawe?page=all> diakses tanggal 19 Desember 2021.
- Pemerintah Kabupaten Melawi, (2017). Perubahan Atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu Dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat Di Kabupaten Melawi.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Telaga Raya, Desa Teluk Pongkal, Desa Nanga Tangkit, Desa Penyengkuang, Desa Melana, Desa Nanga Potai, Desa Sepakat, Desa Muara Tanjung, Desa Landau Kabu Dan Desa Tanjung Mahung Di Kecamatan Sokan.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Bukit Raya, Desa Lintah Taum, Desa Laja, Desa Keluas Hulu, Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Ganjang, Desa Pelita Kebaya, Desa Tanjung Beringin Raya, Desa Tanjung Gunung, Dan Desa Keranjik Di Kecamatan Tanah Pinoh.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Meta Bersatu, Desa Nanga Kasai, Desa Nanga Kompi, Desa Nanga Mancur, Desa Siling Permai, Desa Langkah Indah, Desa Sayan Jaya, Desa Nanga Pak, Desa Tumbak Raya, Desa Berobai Permai, Dan Desa Nanga Raku Di Kecamatan Sayan.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Belaban Ella, Desa Pelaik Keruap, Desa Nanga Keruap, Desa Batas Nangka, Desa Nusa Poring, Desa Batu Onap, Desa Batu Badak, Desa Oyah, Desa Lihai, Dan Desa Sampak Di Kecamatan Menukung.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Popai, Desa Kahiya, Desa Bemban Permai, Desa Perembang Nyuruh, Desa Sungai Labuk, Desa Sungai Mentoba, Desa Natai Compa, Desa Pelempai Jaya, Desa Domet Permai, Desa Nyanggau Dan Desa Jabai Di Kecamatan Ella Hilir.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Tekaban, Desa Piawas, Desa Labang, Desa Nanga Pau, Desa Nanga Entebah, Desa Kayu Bunga, Desa Nanga Menunuk Dan Desa Sepan Tonak Di Kecamatan Belimbing.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Tanjung Lay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, Desa Merpak, Desa Senibung, Desa Semadin Lengkong, Desa Pelinggang, Desa Nyanggai, Desa Sungai Bakah, Desa Bayur Raya, Desa Tebing Kerangan, Desa Merah Arai, Desa Kenual, Desa Landau Tubun, Desa Tanjung Tengah, Desa Nanga Kelawai, Desa Suka Damai, Desa Tanjung Arak, Desa Melawi Kiri Hilir, Desa Kompas Raya Dan Desa Kayan Semapau Di Kecamatan Nanga Pinoh.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang



- Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah. Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat.
- Pinther, M., dkk. (2013). *International Boundary Making*. International Federation of Surveyor. Denmark.
- Prabowo, H. L. (2011). Penetapan Batas Wilayah Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif: Studi Kasus Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. *Tesis*. Program Pascasarjana Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prakarsa, S. (2017). Validasi Batas Administrasi Desa Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). *Skripsi*. Program Sarjana Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh September, Surabaya.
- Pratiwi, I. D. (2018). Kajian Delineasi Batas Desa Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prihandito, A. (1998). *Proyeksi Peta*. Kanisius. Yogyakarta.
- Purwanti, R., & Budisusanto, Y. (2015). Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik Studi Kasus: Kecamatan Sukolilo. *Jurnal Ilmiah Geomatik*, 21(1), 25–30.
- Riadi, B. (2015). Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(1), 92–100.
- Riadi, B., & Makmuriyanto, A. (2014). Kajian Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Kartometris. *Majalah Ilmiah Globe*, 16(2), 109–116.
- Riadi, B., & Rachma, R. N. (2017). Kajian Prototipe Peta Desa Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Study Of Village Map Prototype Using High Resolution Satellite Imagery). *Majalah Ilmiah Globe*, 19(2), 147–156.
- Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011). Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo. *Majalah Ilmiah Globe, Volume 13*(1), Hal 41-49.
- Rustiadi, Ernan, Dkk. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Rakyat. Jakarta.
- Samekto, Fx. A. (2009). *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Snyder, John Parr,. (1987). *Map Projections – A Working Manual*. U.S Government Printing Office. Washington.
- Starke, J.G. (2007). *Pengantar Hukum Internasional*. diterjemahkan oleh Djajaatmadja, B.I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- Sumaryo. (2015). Asesmen Peran Informasi Geospasial Dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Disertasi*. Program Pascasarjana Ilmu Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta



- Supartini, N. K.. (2017). Kajian Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pakraman Di Bali Secara Kartometrik Dengan Pendekatan Partisipatif (Studi Kasus : Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali). *Skripsi*. Program Sarjana Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suripto, I. (2021). *Kades di Brebes Ditahan Gegara Tilap Dana Desa Rp 101 Juta*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5854166/kades-di-brebes-ditahan-gegara-tilap-dana-desa-rp-101-juta> diakses tanggal 19 Desember 2021.
- Susanto. (1993). *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sutanta, H., Pratiwi, I.D., Atunggal, D., Cahyono, B.K., & Diyono. (2018). Analisis Hasil Delineasi Batas Desa di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Geomatika*, 26(2), 83-94.
- Sutisna, S. (2006). Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pusat Pemetaan Batas Wilayah*.
- Syahliaawati, U. (2016). Pemetaan Partisipatif Untuk Pembuatan Peta Batas Rt, Dusun, Dan Desa Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Program Sarjana Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wahyuningrum, D. (2018). Pembuatan Sistem Informasi Batas Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Tesis*. Program Pascasarjana Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wibowo, T. W., Ambhika, N., & Pratama, A. P. (2019). Teknik Geovisualisasi Untuk Percepatan Pemetaan Batas Desa Di Daerah Berbukit (Studi Kasus Di Desa Terong, Kecamatan Dlingo). *Majalah Ilmiah Globe*, 21(1), 35–44.